



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD ADAM**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **691234**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.582.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 526 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **188.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



3. MOBIL, HONDA BRIO/MINIBUS Tahun 2021, LAINNYA Rp.
180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.011.749
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.853.511.749
III. HUTANG	Rp.	95.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.758.311.749

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.